

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori Dasar

1. Eksploitasi Ekonomi

a. Pengertian Eksploitasi Ekonomi

Menurut Kiswanto (2024:11), Eksploitasi melalui sistem kerja paksa dan kebijakan ekonomi menciptakan ketidakstabilan, namun juga memperkenalkan elemen modernisasi yang bertahan hingga pasca kemerdekaan. Eksploitasi berarti, pada dasarnya, bekerja lebih banyak jam daripada yang diperlukan untuk menghasilkan barang yang dikonsumsi, dan dengan demikian hubungan yang eksploitatif dipengaruhi oleh keputusan menabung/investasi (Veneziani, 2018:03).

Menurut Prayoga (2014:08), bentuk-bentuk eksploitasi yang dilakukan oleh supervisor (*petty bourgeois*) yaitu eksploitasi terhadap nilai pekerjaan, eksploitasi ini mengarah pada adanya waktu deadline project yang telah dimanipulasi oleh supervisor. Sehingga buruh harus meminimalkan waktu luangnya demi tercapainya target dan terhindar dari hukuman. Kedua eksploitasi nilai tenaga kerja. Eksploitasi ini mengarah pada tenaga buruh surveyor yang tidak dihargai secara semestinya sehingga menyebabkan alienasi. Pernyataan prayoga memberikan penjelasan bahwa eksploitasi yang dilakukan supervisor

merugikan salah satu pihak, mereka kehilangan hak-haknya sebagai manusia normal, mereka harus bekerja di bawah tekanan serta tidak dihargai secara semestinya, sebagaimana dalam QS. Asy-Syu'ara: 183, yaitu sebagai berikut:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya: *“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.”*

Menurut Ferguson (2018:293), eksploitasi sebagai kesalahan moral yang khas dapat mencemari bahkan pertukaran ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan secara Pareto. Fakta bahwa transaksi ekonomi terjadi antara orang dewasa yang sepakat dan sepenuhnya informasi tidak berarti bahwa transaksi tersebut secara moral tidak tercela, dan transaksi itu mungkin salah secara moral selain, dan dalam beberapa kasus bahkan terlepas dari, ketidaksetaraan yang ditimbulkannya. Eksploitasi dilihat sebagai relasi tidak adil di mana satu pihak mendapat manfaat dari pihak lain yang lemah. Penekanan pada karakter relasional, struktur, dan konteks sosial-ekonomi (Woodcock, 2020:56).

Menurut Marx (dalam Duménil & Lévy, 2003:13), menyebut eksploitasi sebagai proses di

mana satu kelompok orang memperoleh manfaat dari hasil kerja orang lain; kelompok orang ini disebut kelas. Perlu dicatat bahwa eksploitasi ini adalah salah satu dari banyak yang terkait dengan kategori lain seperti pekerjaan, usia, jenis kelamin, etnis, dll.

Eksplorasi dikonsepsikan sebagai produk sistematis dari struktur transaksi ekonomi, di mana sebagian hasil kerja dari agen yang dieksplorasi diambil alih oleh para pengeksploitasi karena hubungan kekuasaan yang asimetris yang dihasilkan dari kepemilikan pribadi (Yoshihara & Veneziani, 2018:409).

Menurut Senoaji et al., (2024:03), Ekonomi sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena sangat menentukan bagaimana manusia mengelola sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan yang tak terbatas. Ekonomi memberikan dasar pemikiran yang mendalam tentang bagaimana manusia memilih prioritas dan membagi aset manusia dalam setiap tindakan dan keputusan yang manusia ambil.

Eksplorasi terhadap kekayaan alam menjadi salah satu ciri utama pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. Demi memenuhi ambisi memenangkan Perang Dunia II, Jepang menjadikan wilayah Indonesia sebagai salah satu basis penting untuk menghadapi Sekutu. Lahan-lahan perkebunan yang

sebelumnya dikelola pada masa Hindia Belanda tetap dimanfaatkan karena dianggap mampu menghasilkan keuntungan dalam jangka panjang. Pemerintahan Jepang yang bersifat militer mengarahkan seluruh kegiatan ekonomi untuk mendukung kebutuhan perang. Akibatnya, sumber daya alam maupun tenaga manusia di Indonesia dieksploitasi secara besar-besaran demi kepentingan perang Jepang melawan Sekutu (Rachmawati et al., 2024:90).

Berdasarkan pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa eksploitasi merupakan praktik sistematis di mana satu pihak mendapatkan keuntungan dari kerja atau sumber daya pihak lain melalui hubungan kekuasaan yang tidak seimbang. Bentuknya bisa berupa kerja paksa, manipulasi waktu dan nilai tenaga kerja, atau pengambilan hasil produksi dan sumber daya alam secara tidak adil. Eksploitasi tidak hanya menimbulkan ketidakadilan dan alienasi, tetapi juga berdampak pada stabilitas sosial dan ekonomi. Secara historis, praktik eksploitasi, seperti pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, berperan dalam penguasaan sumber daya alam dan tenaga manusia demi kepentingan pihak yang berkuasa. Meskipun bersifat merugikan, eksploitasi terkadang memperkenalkan elemen modernisasi yang bertahan hingga pasca-periode tersebut. Dalam konteks ekonomi, eksploitasi terkait

erat dengan distribusi sumber daya, keputusan investasi, dan struktur sosial-ekonomi yang asimetris.

b. Pengertian Sumber Daya Alam

Menurut Purba et al., (2023:04), sumber daya alam merupakan suatu yang ada di alam yang berguna dan mengandung nilai dalam kondisi di mana kita menemukannya. Tidak dapat dikatakan sebagai sumber daya alam, apabila sesuatu yang ditemukan tidak diketahui kegunaannya sehingga tidak mempunyai nilai, atau sesuatu yang berguna tetapi tidak tersedia dalam jumlah besar dibanding permintaannya, sehingga dapat dianggap tidak bernilai. Secara ringkas, sesuatu dikatakan sebagai sumber daya alam apabila memenuhi tiga syarat:

- a) Sesuatu itu ada.
- b) Dapat diambil, dan;
- c) Bermanfaat.

Sumber daya alam adalah seluruh kekayaan di bumi, baik yang bersifat hayati maupun nonhayati, yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Seiring meningkatnya kebutuhan manusia, tekanan terhadap sumber daya alam pun semakin besar. Berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut akan terus dilakukan, terutama karena jumlah penduduk manusia yang terus mengalami pertumbuhan (Zuriyani, 2017:01).

Sumber daya alam merupakan kekayaan yang berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan serta meningkatkan kesejahteraan manusia. Seiring dengan perkembangan teknologi, kebutuhan terhadap sumber daya alam juga semakin meningkat. Oleh karena itu, pemanfaatannya harus disertai dengan upaya pemeliharaan dan pelestarian, mengingat sebagian sumber daya alam memiliki jumlah yang terbatas. Demi keberlangsungan hidup manusia, diperlukan tindakan pengelolaan yang bijaksana serta kesadaran yang tinggi agar keseimbangan ekosistem tetap terjaga (Jizya, 2017:23).

Pengertian sumber daya alam menurut Suryanegara (dalam Amalia et al., 2021:14) ialah segala komponen alam baik yang terdiri dari unsur hayati maupun fisik yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia agar dapat menyejahterakan kehidupan manusia itu sendiri. Sedangkan menurut Maulana & Ferdian (2025:464), konflik sosial dan sumber daya alam adalah fenomena kompleks yang mencerminkan hubungan erat antara akses, pemanfaatan, dan ketimpangan ekologi. Akses yang tidak adil terhadap sumber daya, pemanfaatan yang eksploitatif, dan distribusi manfaat yang timpang telah menciptakan ketegangan sosial yang meluas. Konflik

ini tidak hanya merugikan masyarakat lokal tetapi juga mengancam kelestarian lingkungan dan stabilitas sosial secara keseluruhan.

Menurut Irham et al., (2024:16), pemberdayaan masyarakat lokal melalui pengelolaan SDA berbasis komunitas juga menjadi peluang penting untuk mengurangi ketimpangan sosial ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Nadziroh (dalam Timikasari et al., 2022:46), secara tradisional, peran pertanian dalam perkembangan ekonomi hanya dipandang pasif sebagai unsur penunjang. Peran utama pertanian hanya di anggap sebagai sumber tenaga kerja dan dan sektor penghasil bahan-bahan pangan. Adapun peran sektor pertanian dalam perkembangan ekonomi di Indonesia yaitu:

- a) Sebagai sektor penghasil bahan Pangan.
- b) Sebagai sumber tenaga kerja bagi sektor ekonomi lain.
- c) Sebagai salah satu penghasil sumber devisa bagi negara.
- d) Meningkatkan permintaan akan produk industri dan dengan demikian mendorong keharusan diperluasnya sektor sekunder dan tersier.

Berdasarkan berbagai pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa Sumber daya alam merupakan seluruh komponen alam, baik hayati maupun

nonhayati, yang memiliki nilai guna dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan serta meningkatkan kesejahteraan manusia. Pemanfaatan sumber daya alam yang terus meningkat akibat pertumbuhan penduduk dan perkembangan teknologi menuntut adanya pengelolaan yang bijaksana, adil, dan berkelanjutan. Pengelolaan yang tidak tepat dapat menimbulkan konflik sosial, ketimpangan ekonomi, serta kerusakan lingkungan, sedangkan pengelolaan berbasis pemberdayaan masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem.

c. Eksploitasi Sumber Daya Alam

Menurut Zaini & Nur (2025:261), praktik eksploitasi sumber daya alam memicu ketimpangan sosial dan konflik horizontal, di mana manfaat ekonomi jangka pendek hanya dinikmati oleh segelintir pihak, sementara kerugian lingkungan dan sosial ditanggung oleh masyarakat luas. Kondisi eksploitasi sumber daya alam tersebut dinilai sangat merugikan masyarakat. Meskipun masyarakat setempat memiliki peran, peran tersebut sangat kecil dan cenderung hanya sebagai pelengkap. Mereka tetap berusaha bertahan dan bekerja di tanah milik mereka sendiri, namun keterlibatannya dalam pengambilan keputusan sangat terbatas. Dalam beberapa kasus, memang melibatkan masyarakat adat atau kepala suku

setempat dalam proses pengambilan dan penerapan kebijakan di wilayah tersebut, tetapi keterlibatan tersebut tidak bersifat menentukan (Mambrasar et al., 2025:08).

Menurut Firman Hidayat et al., (2025:05), hubungan antara eksploitasi sumber daya alam, pertumbuhan ekonomi, dan kelestarian lingkungan menunjukkan adanya dilema pembangunan. Meskipun eksploitasi sumber daya alam mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek, dampak lingkungan yang ditimbulkannya sering kali mengancam kualitas hidup serta keberlanjutan ekonomi dalam jangka panjang. Negara-negara yang kaya akan sumber daya alam, termasuk Indonesia, kerap menghadapi tantangan dalam mewujudkan pertumbuhan berkelanjutan karena tingginya ketergantungan pada sektor sumber daya alam tanpa diimbangi dengan diversifikasi ekonomi yang memadai.

Pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan memberikan pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Negara-negara seperti Indonesia dan Nigeria, yang sangat bergantung pada eksploitasi sumber daya alam, sering mengalami rendahnya stabilitas ekonomi serta menghadapi kesulitan dalam mengelola sumber daya secara berkelanjutan (Septiana et al., 2024:324).

Menurut Naila et al., (2025:343), ketergantungan yang tidak berkelanjutan pada ekstraksi SDA berisiko menciptakan "kutukan sumber daya" (*resource curse*), di mana manfaat ekonomi tidak sebanding dengan biaya ekologis dan sosial yang ditimbulkan.

Menurut Sinta et al., (2024:172), eksploitasi merupakan praktek manusia yang melibatkan eksploitasinya terhadap sumber daya alam secara berlebihan, mengancam ketersediaan sumber daya tersebut, dan berpotensi menyebabkan kepunahan. Manusia terlibat dalam tindakan eksploitasi ini karena seringkali kurang mempertimbangkan dampak jangka panjang dari aktivitas mereka. Ada anggapan bahwa sumber daya alam yang dikelola akan selalu tersedia tanpa batas, terutama mengingat Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah.

Eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan dan tidak terencana dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kelestarian lingkungan. Eksploitasi SDA berarti mengambil dan memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia, namun dapat merugikan masyarakat sekitar, terutama dari sisi ekonomi. Jika eksploitasi ini mengabaikan aspek lingkungan, hal tersebut akan mengancam keberlanjutan dan ketersediaan sumber daya alam di masa depan.

Berdasarkan pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan dan tidak terencana menimbulkan berbagai dampak negatif, baik secara sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Praktik ini sering menciptakan ketimpangan sosial, konflik, serta merugikan masyarakat lokal, meskipun mereka memiliki peran terbatas dalam pengambilan keputusan. Meskipun eksploitasi SDA dapat mendorong pertumbuhan ekonomi jangka pendek, dampak lingkungan dan ketergantungan yang tinggi pada sumber daya alam mengancam keberlanjutan ekonomi dan kualitas hidup dalam jangka panjang. Selain itu, eksploitasi yang tidak berkelanjutan berpotensi menimbulkan "kutukan sumber daya" dan mengancam ketersediaan SDA di masa depan. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan secara bijaksana, berkelanjutan, dan memperhatikan keseimbangan antara pemanfaatan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

2. Sistem Tenaga Romusha

a. Pengertian Romusha

Menurut Sinaga et al., (2024:384), romusha adalah tenaga kerja paksa yang umumnya terdiri dari para pemuda, terutama petani dan penganggur, yang dimobilisasi untuk membantu upaya perang Jepang melawan Sekutu. Mereka bekerja di berbagai proyek,

seperti pembangunan infrastruktur militer (jalan raya, jembatan, kubu pertahanan, dan lapangan udara), pabrik, serta di pelabuhan. Pada tahun 1943, Jepang meluncurkan kampanye baru yang menyebut Romusha sebagai “prajurit ekonomi”. Penamaan ini dimaksudkan untuk memberikan kesan lebih terhormat dibanding sebutan lain yang dianggap merendahkan (Putri et al., 2018:06).

Menurut Tambunan et al., (2024:101), romusha adalah kelompok orang Indonesia yang dipekerjakan secara paksa oleh pemerintah Jepang selama pendudukan Jepang di Asia Tenggara pada Perang Dunia II. Mereka diperintahkan untuk bekerja di berbagai proyek konstruksi, seperti jalan, rel kereta api, bandara, dan juga di sektor pertanian. Pengalaman mereka dipenuhi dengan penderitaan yang luar biasa, termasuk kelaparan, penyiksaan, dan kematian akibat kondisi kerja yang keras dan kejam.

Menurut Aiko Prajabnasti (2024:110), bahwa jika kita berbicara tentang pendudukan Jepang, maka peristiwa romusha merupakan pengalaman mengerikan yang paling diingat oleh orang Indonesia. Sedangkan menurut Fuadah et al., (2020:06), masyarakat dijadikan romusha (kerja paksa), Sehingga banyak korban kelaparan dan terkena penyakit.

Menurut Hutagalung (2018:54), jepang memaksa para pemuda untuk dijadikan pekerja-paksa

(Romusha), yang dikirim antara lain ke Birma, untuk membangun jembatan dan bangunan-bangunan yang diperlukan oleh Jepang. Romusha adalah istilah yang digunakan selama pendudukan Jepang di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, untuk menyebut tenaga kerja paksa lokal yang direkrut untuk proyek-proyek militer, infrastruktur, dan industri Jepang pada masa Perang Dunia II. Pekerja Romusha biasanya diambil secara paksa atau dengan tekanan, bekerja di kondisi berat dan berisiko tinggi, serta sering menerima upah rendah atau bahkan tidak sama sekali.

Berdasarkan pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa romusha adalah tenaga kerja paksa yang direkrut Jepang selama pendudukan di Asia Tenggara, terutama dari kalangan pemuda, petani, dan penganggur, untuk bekerja di proyek militer, infrastruktur, industri, dan pertanian. Mereka mengalami penderitaan berat, termasuk kelaparan, penyakit, penyiksaan, dan kematian akibat kondisi kerja yang keras. Meskipun Jepang menyebut mereka “prajurit ekonomi” untuk memberi kesan terhormat, kenyataannya mereka dipaksa bekerja tanpa hak yang memadai dan sering menghadapi risiko tinggi.

b. Bentuk Sistem Romusha

Menurut Budisantosa (2017:717), kegiatan romusha adalah salah satu kegiatan yang memakan banyak korban, kondisi pekerjaan yang berat tidak di

dukung dengan peningkatan taraf hidup, menjadikan rakyat miskin dan tertindas. Dalam 14 buku teks yang dianalisis, istilah “Romusha” paling sering digunakan sebagai simbol utama pendudukan militer Jepang (1942-1945). Sebagian besar buku menggambarkan sebagai “tenaga kerja paksa yang menderita”, dengan penjelasan tentang mobilisasi, kondisi kerja, metode pengiriman, dan jumlah pekerja. Secara keseluruhan, citra Romusha dalam buku sejarah Indonesia adalah buruh paksa yang tragis dan tertindas (Textbooks, 1995:165).

Pada awalnya, para Romusha datang ke Bayah dengan harapan dapat memperbaiki kehidupan mereka. Namun, kenyataan justru jauh berbeda. Selama bekerja sebagai romusha, mereka dipaksa melakukan pekerjaan berat dengan peralatan yang sangat terbatas, mengalami berbagai bentuk siksaan fisik maupun mental, kekurangan asupan makanan bergizi, serta harus bertahan dalam kondisi lingkungan yang keras dan tidak manusiawi (Hermawan, 2017:223).

Menurut Saputra (2018:421), Romusha merupakan tenaga buruh kerja paksa yang direkrut berumur sekira 16-40 tahun, baik perempuan dan laki-laki. Praktik romusha ini dimobilisasi menggunakan struktur pemerintahan yang paling relatif dekat di level kecamatan (*son*), desa (*ku*), dan rukun tetangga (*Tonarigumi*). Mereka bekerja untuk Militer Jepang

melalui aparat pemerintahan lokal dengan instruksi bersifat sukarela dan memaksa. Tidak semua Romusha yang bekerja pada proyek-proyek militer Jepang menerima upah. Hanya mereka yang mendaftar secara sukarela yang umumnya memperoleh gaji, sedangkan para Romusha yang dikirim oleh pejabat daerah sebagai bagian dari jatah tenaga kerja tidak mendapatkan bayaran sama sekali. Dengan demikian, sebagian besar Romusha yang dikerahkan untuk kepentingan militer Jepang bekerja tanpa imbalan (Pudyastoto, 1992:230).

Masyarakat dipilih untuk dijadikan urang rantai, yang bertugas bekerja memenuhi kebutuhan logistik perang, serta mereka yang berpotensi dijadikan tentara untuk membantu pertahanan Jepang. Laki-laki dari Nagari Sirukam berusia 18-25 tahun direkrut sebagai tentara untuk dilatih membantu pasukan Jepang dalam menghadapi perang. Sementara itu, mereka yang menjadi urang rantai diminta mengerjakan pembangunan gedung dan jalan. Fungsi utama urang rantai adalah mempermudah pemerintah Jepang dalam memanfaatkan sumber daya alam (Yuren & Hardi, 2021:211.).

Setiap tiga wilayah yang dibawah pengawasan pemerintahan militer memiliki sistem organisasi untuk menyiapkan tenaga kerja sebagai Romusha. Pulau Jawa menjadi wilayah dengan tingkat mobilisasi penduduk

tertinggi untuk dijadikan pekerja Romusha. Para pekerja Romusha kemudian disebarkan ke daerah-daerah yang menurut kepala pemerintahan Jepang memerlukan banyak tenaga, seperti di Sumatera, Kalimantan, dan Jawa bagian selatan. Selain disebarkan di dalam negeri, para Romusha juga dikirim ke luar negeri, termasuk ke Singapura, Filipina, Malaysia, dan Birma (Sofansyah, 2021:44-52).

Beberapa kebijakan kolonial Jepang merugikan, termasuk rakyat Indonesia diwajibkan untuk menanam tanaman yang dapat mendukung perang; eksploitasi sumber daya alam yang menyebabkan masyarakat Indonesia menderita kemiskinan, kelaparan, dan kesengsaraan; kerja paksa atau romusha tanpa gaji, dan lain-lain (Shofwan & Farantika, 2022:10.).

Berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa romusha merupakan tenaga kerja paksa yang direkrut selama pendudukan Jepang untuk kepentingan militer dan logistik perang. Mereka bekerja dalam kondisi sangat berat, minim upah atau bahkan tanpa bayaran, serta menghadapi siksaan fisik, kekurangan gizi, dan lingkungan kerja yang keras. Sistem Romusha dilakukan melalui struktur pemerintahan lokal, dengan mobilisasi tinggi terutama di Pulau Jawa, dan pekerjaannya meliputi pembangunan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam. Secara keseluruhan, praktik Romusha

mencerminkan eksploitasi yang menimbulkan penderitaan, kemiskinan, dan kesengsaraan bagi rakyat Indonesia.

3. Kolonialisme dan Imperialisme

Kolonialisme berperan sebagai bagian dari upaya yang mendukung orientalisme untuk mengubah persepsi terhadap Timur dan budaya timur yang ada. Meskipun secara struktural orientalisme dan kolonialisme tidak saling terkait, keduanya memiliki hubungan saling menguntungkan bagi kepentingan masing-masing (Sakti et al., 2024:139).

Menurut Linda & Sari (2025:200), kolonialisme adalah suatu sistem atau praktik kekuasaan di mana suatu negara menduduki dan menguasai wilayah lain di luar batas geografisnya dengan tujuan mengeksploitasi sumber daya alam, tenaga kerja, dan kekayaan wilayah tersebut, sering kali dengan cara yang merugikan atau menindas penduduk lokal. Pernyataan Linda dan Sari memberikan keterangan bahwa kolonialisme melakukan eksploitasi sumber daya alam yang membuat masyarakat dirugikan dan mereka juga menindas masyarakat lokal, dalam QS. Al-Baqarah: 188, dijelaskan bahwa kita tidak boleh memakan harta sesama kita, hal tersebut sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَذُلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ

Artinya: *“Dan janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil dan (janganlah) kamu menyuap para penguasa...”*

Menurut Afandi (dalam (Aqvi et al., 2024:04), kolonialisme adalah suatu tindakan untuk menguasai wilayah bangsa lain yang bertujuan untuk menguras atau mendapatkan sumber daya suatu bangsayang di kuasai demi pengolahan industrialisasi di Negara kolonisator. Dalam hal ini kesejahteraan maupun Pendidikan di daerah koloni tidak diperhatikan.

Hubungan tersebut dipertahankan oleh penguasa kolonial melalui penerapan kebijakan yang bersifat normatif. Selain itu, dominasi kolonial terhadap bangsa terjajah berlangsung secara beragam, tidak hanya di bidang politik, tetapi juga merambah bidang ekonomi, sosial, dan budaya (Kurniawan, 2015:76).

Imperialisme menekankan dominasi atau keunggulan satu bangsa terhadap bangsa lain. Tujuan utamanya adalah memperoleh keuntungan ekonomi, karena sumber daya negara mereka sendiri dianggap tidak cukup. Selain faktor ekonomi, terdapat keyakinan bahwa bangsa tertentu lebih unggul dibanding bangsa lain, yang dikenal sebagai etnosentrisme, seperti yang terjadi pada bangsa Jerman dan Italia (Amril, 2015:16).

Menurut Eryanto (2015:03), imperialisme yaitu sebuah dominasi dari satu negara ke negara yang lain secara ekonomi, politik dan sosial. Pada umumnya dilakukan oleh negara yang maju dan superpower terhadap negara berkembang atau miskin. Terdapat beberapa jenis imperialisme yaitu imperialisme politik, imperialisme ekonomi, militer ataupun kebudayaan. Imperialisme merupakan kata yang berasal dari bahasa latin yaitu “*imperare*” yang artinya memerintah. Hak untuk memerintah (*imperare*) disebut “*imperium*”, sedangkan orang yang diberi hak memerintah (*imperium*) adalah “*imperator*”. Yang lazimnya diberi *imperium* itu adalah raja karena itu seorang raja kadang disebut dengan imperator dan kerajaannya disebut *imperium*, dimana *imperium*nya berlaku (Wari, 2020:03).

Imperialisme adalah kebijakan atau praktik suatu negara yang bertujuan untuk memperluas kekuasaannya dengan menguasai wilayah, bangsa, atau negara lain, baik secara politik, ekonomi, maupun militer. Tujuan utama imperialisme biasanya mencakup eksploitasi sumber daya, memperoleh keuntungan ekonomi, memperluas pengaruh politik, dan menunjukkan dominasi atau keunggulan suatu bangsa atas bangsa lain.

Berdasarkan pendapat para ahli dapat, disimpulkan bahwa kolonialisme dan imperialisme merupakan bentuk dominasi suatu negara terhadap wilayah atau bangsa lain dengan tujuan memperoleh keuntungan politik, ekonomi,

dan sosial. Kolonialisme menekankan penguasaan wilayah dan eksploitasi sumber daya alam serta tenaga kerja, sering kali merugikan penduduk lokal, dan diterapkan melalui kebijakan normatif yang menjangkau bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Sementara itu, imperialisme menonjolkan dominasi dan keunggulan suatu bangsa atas bangsa lain, baik secara ekonomi, politik, militer, maupun budaya, dengan tujuan memperluas kekuasaan, mengeksploitasi sumber daya, dan menunjukkan superioritas, sering didasari oleh keyakinan etnosentrisme. Kedua konsep ini saling terkait dalam praktik sejarah dan sering saling mendukung untuk memperkuat kekuasaan negara dominan.

4. Dampak Sosial dan Ekonomi

a. Pengertian Dampak

Menurut Rusli (2019:112), dalam kehidupan sehari-hari, kata dampak merupakan kata yang telah sering digunakan dalam masyarakat luas dan hampir familiar di semua tataran usia. Penggunaan kata dampak biasanya dibarengi dengan imbas akhir yang disampaikan di dalam kalimat dan masyarakat secara luas pada umumnya menggunakannya dengan pengelompokkan sebagai berikut:

1) Dampak Positif

Ini disebut juga akibat baik/ pengaruh menguntungkan yang didapatkan dari berbagai hal atau peristiwa yang terjadi.

2) Dampak Negatif

Dalam hal ini pengaruh atau akibat yang dihasilkan dari kata dampak adalah merugikan dan cenderung memperburuk keadaan.

Dampak dapat dimaknai sebagai sejauh mana suatu kebijakan mampu menimbulkan konsekuensi yang memunculkan pola perilaku baru pada kelompok sasaran, yang dikenal dengan istilah *impact*. Apabila kebijakan tersebut berupa pelatihan, maka dampak pelatihan dapat diartikan sebagai segala bentuk perubahan yang muncul sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan atau program pelatihan, baik yang bersifat positif maupun negatif, yang memengaruhi individu maupun organisasi (R. Hermawan, 2021:23).

Menurut Fajriani et al., (2023:04), berdasarkan pengaruhnya, dampak terbagi menjadi beberapa:

- a) Dampak positif, dampak yang memberikan perubahan yang lebih baik, yang tidak merugikan pihak lain.
- b) Dampak negative, dampak yang memberikan perubahan ke arah yang lebih buruk dari sebelumnya merugikan pihak lain.
- c) Dampak langsung, dampak yang dapat dirasakan secara langsung oleh pihak-pihak yang terlibat.

- d) Dampak tidak langsung, dampak yang tidak dirasakan langsung oleh pihak-pihak yang tidak terlibat langsung.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dampak diartikan sebagai benturan atau pengaruh kuat yang mendatangkan akibat, baik positif maupun negatif. Istilah ini menggambarkan hasil, efek, atau imbas dari suatu perbuatan atau peristiwa. Definisi Utama Dampak menurut KBBI:

- 1) Benturan: Peristiwa tabrakan atau pengaruh yang kuat.
- 2) Pengaruh: Daya yang timbul dari sesuatu (orang/benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.
- 3) Akibat: Hasil akhir yang ditimbulkan oleh suatu kejadian atau keputusan, yang bisa bersifat positif (menguntungkan) atau negatif (merugikan).

Menurut Telung et al., (2019:03), dampak adalah suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat dari suatu aktivitas atau tindakan yang dilaksanakan sebelumnya yang merupakan konsekuensi dari dilaksanakannya suatu kebijakan sehingga akan membawa perubahan baik positif maupun negatif.

Berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa dampak merupakan pengaruh atau akibat yang timbul dari suatu tindakan,

peristiwa, atau kebijakan yang menghasilkan perubahan tertentu. Dampak dapat bersifat positif maupun negatif, serta dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung oleh individu maupun kelompok sasaran. Dalam konteks kebijakan atau pelatihan, dampak mencerminkan sejauh mana kegiatan tersebut mampu menimbulkan perubahan perilaku, kondisi, atau kinerja yang memengaruhi individu dan organisasi. Dengan demikian, dampak menjadi indikator penting untuk menilai hasil dan konsekuensi dari suatu aktivitas atau program yang dilaksanakan.

b. Definisi Dampak Sosial dan Ekonomi

Menurut M. Weber (dalam Talipov, 2024:207), mendefinisikan tindakan sosial sebagai tindakan dalam maknanya yang ditujukan kepada orang lain dan terorientasi kepadanya. Ia secara konvensional membedakan antara konsep tindakan dan perilaku. Ia berpendapat bahwa tindakan sosial jauh lebih luas daripada perilaku sosial, karena hampir setiap tindakan manusia terkait langsung dengan apa yang dilakukan orang lain.

Menurut Baharuddin (2004:136), sistem sosial merupakan kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian (elemen atau komponen) yang terdiri dari: a) orang atau kelompok orang berserta kegiatannya, dan b). hubungan sosial, termasuk didalamnya norma norma,

dan nilai-nilai yang mengatur hubungan antara orang atau kelompok orang tersebut. Dampak secara sederhana dapat memiliki arti sebagai sebuah pengaruh atau akibat. Atas sebuah keputusan yang diambil seseorang yang biasanya memiliki dampaknya tersendiri, berupa dampak positif dan negatif, dampak juga bisa merupakan suatu pelaksanaan dari pengawasan internal (Elviani, 2017:158).

Menurut Krisdiyansah et al., (2022:206), pengertian sosial adalah sebagai rangkaian norma, moral, nilai, dan aturan yang bersumber dari budaya masyarakat dan dipakai sebagai acuan dalam interaksi antara manusia dalam suatu komunitas. Sedangkan menurut Safri et al., (2020:03), ekonomi berkenaan dengan setiap tindakan atau proses yang harus dilaksanakan untuk menciptakan barang-barang dan jasa yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan manusia.

Menurut Durán-Sandoval & Uleri, (2024:09), definisi ekonomi dapat mencakup seluruh bidang tanpa menjelaskannya, karena bukan materi yang memberikan barang status ekonomi, melainkan hubungannya dengan kebutuhan individu. Akibatnya, “Kelangkaan sarana untuk memenuhi tujuan tertentu adalah kondisi yang hampir menyeluruh dalam perilaku manusia. Sedangkan menurut Samuelson (dalam Khumalo, 2012:598), merumuskan definisinya tentang

ekonomi menjadi sebuah 'tema umum. Ekonomi adalah studi tentang bagaimana masyarakat menggunakan sumber daya yang langka untuk memproduksi komoditas yang berharga dan mendistribusikannya di antara orang-orang.

Menurut Selo Soemardjan (dalam Agustina, 2019:01), bahwa perubahan sosial sebagai segala perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya termasuk didalamnya nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola-pola perilaku diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Sedangkan menurut Jasupa (2018:03), dampak perubahan sosial adalah akibat yang timbul dari peristiwa perubahan sosial. Dampak tersebut bisa dibagi menjadi dua yaitu dampak positif dan dampak negatif.

Menurut Gusrianto (2019:11), dampak sosial sendiri dapat berasal dari internal dan eksternal masyarakat. Dampak internal adalah dampak yang disebabkan karena faktor dari dalam masyarakat itu sendiri, sementara dampak eksternal adalah dampak yang berasal dari luar masyarakat.

Berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa dampak sosial dan ekonomi muncul dari setiap tindakan manusia yang selalu berhubungan dengan orang lain dan berlangsung dalam sistem sosial yang diatur oleh nilai, norma, dan pola

hubungan. Dampak sosial terlihat ketika perubahan pada tindakan dan interaksi manusia memengaruhi struktur masyarakat, nilai, dan perilaku, baik melalui faktor internal maupun eksternal. Sementara itu, dampak ekonomi muncul dari tindakan manusia dalam memenuhi kebutuhan melalui penggunaan sumber daya yang langka, sehingga segala keputusan produksi, distribusi, dan konsumsi menimbulkan pengaruh tertentu terhadap kesejahteraan dan aktivitas ekonomi. Dengan demikian, setiap tindakan dalam masyarakat secara bersamaan menghasilkan dampak sosial dan ekonomi karena keduanya berakar pada interaksi manusia dan keterbatasan sumber daya.

5. Pengertian Masyarakat

Menurut Adi (2022:32), masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang karena tuntutan kebutuhan dan pengaruh keyakinan, pikiran, serta ambisi tertentu dipersatukan dalam kehidupan kolektif. Sistem dan hukum yang terdapat dalam suatu masyarakat mencerminkan perilaku-perilaku individu karena individu-individu tersebut terikat dengan hukum dan sistem tersebut.

Sedangkan Menurut Hendropuspito OC (Handoyo et al., 2015:02), mendefinisikan masyarakat sebagai kesatuan yang tetap dari orang-orang yang hidup di daerah tertentu dan bekerja sama dalam kelompok-kelompok berdasarkan kebudayaan yang sama untuk mencapai kepentingan yang sama. Masyarakat dengan demikian

memiliki ciri-ciri: (1) mempunyai wilayah dan batas yang jelas, (2) merupakan satu kesatuan penduduk, (3) terdiri atas kelompok-kelompok fungsional yang heterogen, (4) mengemban fungsi umum, dan (5) memiliki kebudayaan yang sama.

Menurut Nasution & Lubis (2014:10), masyarakat Adalah sekelompok manusia majemuk yang tinggal dalam satu teritorial tertentu dan terdiri dari beraneka ragam kelompok yang memiliki kesepakatan bersama berupa aturan-aturan ataupun adat istiadat yang timbul dan tercipta karena kebersamaan tersebut. Adanya aturan atau adat ini sangat bergantung dengan masyarakat itu sendiri dan juga kesepakatan bersama yang timbul setelah kehidupan itu berlangsung dalam waktu yang lama. Kehidupan masyarakat bersifat dinamis dan senantiasa mengalami perubahan yang tidak dapat dihindari. Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri, melainkan selalu membutuhkan interaksi dan kerja sama dengan manusia lain dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya (Elly, 2017:38).

Menurut Koentjaraningrat (dalam Baharuddin, 2004:19), seorang antropolog Indonesia merumuskan definisi masyarakat sebagai berikut: masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Hampir senada dengan definisi yang diberikan Koentjaraningrat,

Selo Soemardjan seorang sosiolog mengatakan, bahwa masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama, yang menghasilkan kebudayaan. Masyarakat adalah sekelompok manusia yang hidup bersama dalam suatu wilayah tertentu, saling berinteraksi, dan membentuk hubungan sosial berdasarkan norma, adat istiadat, nilai, serta kebudayaan yang sama untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan bersama.

Masyarakat dipandang sebagai suatu bentuk hasil konstruksi yang tersusun dari berbagai unsur pembentuk, atau yang disebut sebagai sintesis yang tidak berdiri secara tunggal. Unsur-unsur pembentuk masyarakat tersebut berkaitan dengan identitas yang melekat pada individu maupun kelompok melalui berbagai lembaga dan organisasi primer yang saling berhubungan. Unsur-unsur tersebut meliputi pendidikan, status sosial, garis keturunan, agama, pekerjaan, gaya hidup, serta ideologi. Keseluruhan unsur ini pada dasarnya bersumber dari penerapan nilai-nilai keilahian yang berperan dalam membentuk tatanan suatu Masyarakat (Wahyuni, 2020:68).

Menurut Suwari (2015:78), masyarakat adalah suatu jaringan hubungan-hubungan antar entitas-entitas. Masyarakat adalah sebuah kelompok atau komunitas yang interdependen atau individu yang saling bergantung antara yang satu dengan lainnya. Pada umumnya sebutan masyarakat dipakai untuk mengacu sekelompok individu yang hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur.

Berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa masyarakat merupakan kesatuan hidup manusia yang terbentuk karena adanya kebutuhan, interaksi, serta kerja sama antarindividu dalam suatu wilayah tertentu. Masyarakat terdiri dari berbagai kelompok yang beragam, namun dipersatukan oleh sistem nilai, norma, adat istiadat, dan kebudayaan yang sama. Kehidupan masyarakat bersifat dinamis dan terus mengalami perubahan, di mana setiap individu saling bergantung satu sama lain. Dengan demikian, masyarakat terbentuk dari hubungan sosial yang berkelanjutan dan menjadi wadah bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup serta mencapai kepentingan bersama.

B. Hasil Penelitian yang Relevan

Ada beberapa hasil penelitian yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu:

Tabel 1. Penelitian yang Relevan

No	Nama	Judul	Metode	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1.	Juliana, (2022)	Peranan Abdur Rahim Damrah Dalam Melawan Penjajahan Jepang Di Kabupaten Bengkulu Selatan (1943-	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah atau metode historis.	Hasil penelitian mengenai Peranan Abdur Rahim Damrah dalam melawan penjajahan Jepang di Bengkulu	a. Persamaan sama-sama membahas masa pendudukan Jepang di Bengkulu dan menggambarkan tekanan yang dialami masyarakat setempat.

		1945)		Selatan ini ialah diawali dengan Abdur Rahim Damrah mengikuti pendidikan Gyugun di Pagaralam.	Keduanya menggunakan pendekatan sejarah serta mengungkap dinamika sosial yang muncul akibat kebijakan Jepang selama perang. b. Perbedaan Jurnal berorientasi pada perlawanan tokoh, sedangkan penelitian ini berorientasi pada kebijakan ekonomi Jepang dan penderitaan masyarakat akibat romusha.
2.	Januari o, (2019)	Kehidupan Sosial Keagamaan Bengkulu Masa Pendudukan Jepang Tahun (1942-1945)	Penelitian Kualitatif dengan Jenis penelitian Studi Pustaka (Library Research) . Metode yang digunakan ialah Metode Historis.	Jepang ingin menguasai semua sektor kehidupan yang ada saat itu dan hal tersebut sangatlah merugikan dan menyengsakan Rakyat. Seperti dalam	a. Persamaan sama-sama mengkaji masa pendudukan Jepang di Bengkulu dan menggambarkan bagaimana masyarakat mengalami tekanan serta perubahan besar dalam aspek sosial dan ekonomi. Keduanya juga menggunakan

				bidang Sosial, dimana Rakyat diperlakukan dengan kasar dan kejam untuk menuruti semua kehendak Jepang tanpa memikirkan nasib rakyat.	pendekatan sejarah untuk memahami situasi masyarakat selama periode tersebut. b. Perbedaan Skripsi memberikan gambaran menyeluruh tentang kehidupan sosial-keagamaan, sedangkan penelitian ini memberikan analisis mendalam tentang eksploitasi ekonomi dan tenaga kerja pada masa pendudukan Jepang di Bengkulu.
3.	(Ayu Nadira Wulandari, 2024).	Masa Pendudukan Jepang Di Indonesia	Artikel ini ditulis dengan menggunakan studi kepustakaan (library research). Studi ini identik dengan kegiatan menganalisis teks	Setelah jatuhnya daerah kekuasaan Hindia Belanda di daerah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku, memudahkan Jepang untuk	a. persamaan sama-sama membahas periode pendudukan Jepang pada 1942-1945 serta menggambarkan tekanan dan penderitaan rakyat akibat kebijakan militer Jepang. b. Perbedaan

			atau wacana	menaklukkan pusat kekuasaan Hindia Belanda yang berada di Batavia (Jakarta). Tentara Jepang itu dipimpin oleh letnan jenderal Hitoshi Imamura yang nantinya akan bertugas melawan sekutu dalam memperebutkan Jawa. Jepang secara resmi menguasai yakni tepat tanggal 9 Maret 1942 saat penanda tanganan piagam penyerahan dari Belanda ke Jepang di sekitar daerah Kali jati.	Fokus penelitian jurnal bersifat luas dan umum, sedangkan Penelitian ini bersifat terarah dan mendetail pada kasus eksploitasi tenaga kerja di Bengkulu.
--	--	--	-------------	---	--

4.	(Tiara Titania dkk, 2025)	Dampak Penjajahan Jepang Dalam Bidang Sosial - Budaya Di Indonesia 1942-1945	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian sejarah. Langkah-langkah yang digunakan meliputi: Heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa di bidang sosial, penjajahan Jepang memiliki dampak yang mendalam. Praktik Romusha (kerja paksa) menyebabkan penderitaan fisik dan mental yang meluas di kalangan masyarakat Indonesia, sedangkan fenomena Jugun ianfu (wanita penghibur paksa) menyebabkan trauma psikologis dan sosial yang berkepanjangan bagi para korbannya.	a. Persamaan sama-sama membahas masa pendudukan Jepang tahun 1942-1945 serta mengungkapkan bagaimana kebijakan Jepang berdampak buruk terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. b. Perbedaan terletak pada fokus dan ruang lingkup kajian. Jurnal membahas dampak sosial dan budaya secara nasional, seperti perubahan dalam sistem pendidikan, kehidupan sosial, kebijakan propaganda, dan pembentukan organisasi masyarakat. Sementara itu, penelitian ini lebih spesifik dan mendalam pada aspek eksploitasi ekonomi, terutama melalui kerja paksa romusha
----	---------------------------	--	---	--	---

C. Kerangka Berpikir

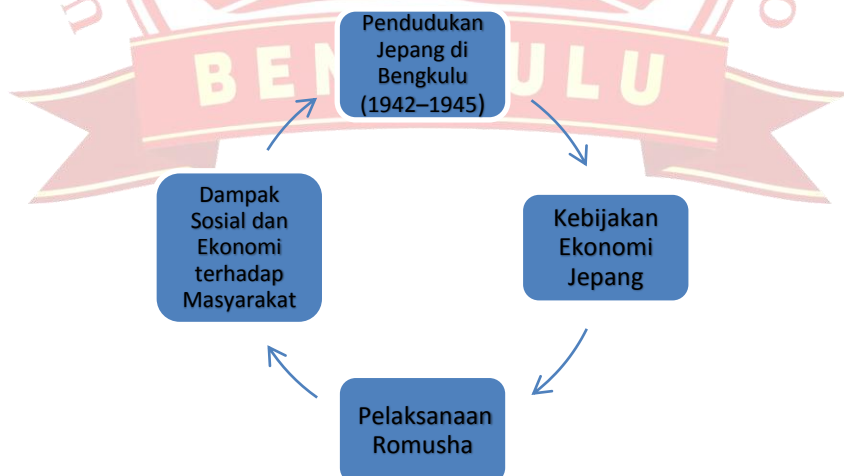
Pendudukan Jepang di Indonesia pada tahun 1942-1945 membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk ekonomi, sosial, dan politik. Salah satu strategi utama Jepang dalam mendukung tujuan militernya adalah mengeksploitasi sumber daya manusia dan alam Indonesia. Di Bengkulu, salah satu bentuk nyata dari eksploitasi ekonomi ini adalah pengerahan tenaga kerja paksa atau Romusha. Romusha merupakan tenaga kerja yang dipaksa oleh Jepang untuk membangun infrastruktur militer, jalan, jembatan, dan fasilitas lain yang mendukung Perang Asia Timur Raya.

Tenaga Romusha di Bengkulu direkrut secara paksa dari masyarakat lokal, termasuk laki-laki dewasa dan kadang remaja. Mereka bekerja dalam kondisi yang sangat berat, tanpa upah yang memadai, dan dengan jam kerja yang panjang. Eksploitasi ini tidak hanya berdampak pada tenaga kerja itu sendiri, tetapi juga memengaruhi kesejahteraan ekonomi masyarakat secara luas. Banyak keluarga kehilangan anggota produktif yang biasanya mengurus pertanian atau mata pencaharian lainnya. Akibatnya, terjadi kekurangan pangan, penurunan hasil pertanian, dan tekanan ekonomi yang signifikan di tingkat rumah tangga.

Selain dampak ekonomi, pengerahan Romusha juga berdampak pada aspek sosial dan psikologis masyarakat. Tekanan yang dirasakan para pekerja dan keluarganya menyebabkan perubahan struktur sosial. Anak-anak dan

perempuan harus mengambil alih pekerjaan produktif yang sebelumnya dilakukan oleh para pekerja Romusha, sehingga mengubah pola kehidupan dan peran sosial dalam masyarakat. Selain itu, kondisi kerja yang keras menimbulkan trauma psikologis dan menurunkan kualitas hidup masyarakat.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Jepang mengeksploitasi masyarakat Bengkulu melalui tenaga Romusha dan dampak yang ditimbulkannya terhadap aspek ekonomi, sosial, dan psikologis masyarakat. Pendekatan penelitian ini bersifat kualitatif. Kerangka pemikiran ini membantu memahami hubungan antara kebijakan pendudukan Jepang, pelaksanaan tenaga Romusha, dan konsekuensi nyata bagi masyarakat Bengkulu. Berikut bagan kerangka pemikiran agar lebih mudah untuk di pahami:



Bagan 1. Kerangka Berpikir